

Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Pemilih Pemula pada Kurikulum Sekolah Menengah bagi Guru Kelompok IPS di Kota Padang Panjang

Eka Vidya Putra^{1*}, Reno Fernandes², Halidi Patra³, Gusmira Wita⁴, Rhavy Ferdyan⁵, Sabar Aulia Rahman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran intrakurikuler, khususnya bagi anggota MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang. Program dilaksanakan melalui kolaborasi antara Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Sosiologi Universitas Negeri Padang (UNP) dan KPU Kota Padang Panjang, bertepatan dengan momentum menjelang Pilkada 2024. Metode pelaksanaan mencakup seminar, *workshop*, *focus group discussion* (FGD), dan *microteaching*. Materi inti meliputi pendidikan pemilih untuk generasi *digital native*, pengenalan *Connected Political Education* (C-PE), serta perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis C-PE. Pendampingan teknis dilakukan secara langsung, termasuk penyusunan perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, dan instrumen evaluasi) dan simulasi pengajaran. Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya perubahan paradigma peserta terhadap konsep politik; guru memahami bahwa pendidikan politik dapat dilakukan secara netral, terintegrasi dengan materi IPS dan PPKn, serta relevan bagi pembentukan sikap kritis siswa. Sebanyak 85% peserta menyatakan peningkatan pemahaman terhadap politik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan 72% mengaku siap mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk memperkuat literasi politik generasi muda melalui pendidikan berbasis sekolah.

Kata Kunci: C-PE, Guru; Pemilih pemula; Pendidikan politik.

Abstract

This community service activity aims to improve teachers' understanding and skills in integrating political education into intracurricular learning, especially for members of the Sociology MGMP in Padang Panjang City. The program was implemented through a collaboration between the Community Service Team of the Sociology Study Program at Padang State University (UNP) and the Padang Panjang City General Elections Commission (KPU), coinciding with the momentum leading up to the 2024 Regional Elections. Implementation methods included seminars, workshops, focus group discussions (FGDs), and microteaching. Core materials included voter education for the digital native generation, an introduction to Connected Political Education (C-PE), and the planning and implementation of C-PE-based learning. Technical assistance was provided directly, including the preparation of learning tools (RPP, teaching materials, and evaluation instruments) and teaching simulations. The results of the activity showed a paradigm shift in participants' understanding of political concepts; teachers understood that political education can be conducted neutrally, integrated with social studies and civics materials, and relevant to the development of students' critical attitudes. 85% of participants stated an increased understanding of politics as part of everyday life, and 72% said they were ready to integrate political education into their learning. The conclusion of this activity emphasized the importance of inter-institutional collaboration to strengthen the political literacy of the younger generation through school-based education.

Keywords: C-PE; Political education; Teacher: Young voter.

How to Cite: Putra, E. V. et al. (2025). Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Pemilih Pemula pada Kurikulum Sekolah Menengah bagi Guru Kelompok IPS di Kota Padang Panjang. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 1021-1028.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pendidikan politik pada era demokrasi digital menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk proses politik. Pemahaman tentang demokrasi tidak hanya mencakup prinsip-prinsip dasar, tetapi juga keterampilan memahami bagaimana teknologi digital memengaruhi penyebaran informasi, partisipasi publik, dan proses pemilihan umum (Rattanasevee et al., 2024). Kemudahan akses informasi di era digital membawa tantangan seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi opini, sehingga menuntut literasi politik yang lebih tinggi termasuk kemampuan memilah fakta dari opini dan membedakan berita terverifikasi dengan yang tidak sebagai mana mestinya, mengingat perannya yang signifikan dalam keberlangsungan demokrasi (Barberá et al., 2018; Kozyreva et al., 2020; Tucker et al., 2018; Tufchi et al., 2023).

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa pemilih berusia 17–30 tahun mencapai 31,2% dari total pemilih. Namun, kelompok ini rentan terhadap mobilisasi kepentingan dan pengaruh yang dapat mengancam kualitas demokrasi (Saputra, 2023). Penelitian Fernandes et al., (2023) mengungkapkan bahwa literasi politik di kalangan siswa sekolah menengah masih rendah, sehingga diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif dan terfokus bagi generasi muda.

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan sarana strategis untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih muda. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, yang menargetkan terwujudnya manusia Indonesia yang demokratis. Namun, hambatan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran (Suntana & Priatna, 2023). Banyak guru belum memiliki pemahaman memadai terkait konsep politik, mekanisme demokrasi, serta strategi pedagogis yang efektif (Donbavand & Hoskins, 2021; Duran, 2017).

Pendekatan yang efektif adalah mengintegrasikan materi pendidikan politik ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti Sosiologi, Pendidikan Kewarganegaraan, atau Bahasa Indonesia (Erlich & Gindi, 2019). Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran politik berlangsung kontekstual, mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa, serta mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya untuk membuka mata pelajaran baru. Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema “Suara Demokrasi” juga dapat menjadi wahana penguatan literasi politik, walaupun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas guru (Fernandes, 2022).

Berdasarkan identifikasi kebutuhan di lapangan, guru rumpun ilmu sosial di Kota Padang Panjang memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran. Pelatihan ini akan memperkenalkan model pembelajaran *Connected Political Education* (C-PE) yang memadukan materi Sosiologi dengan pendidikan politik serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran interaktif. Model ini telah terbukti efektif meningkatkan literasi politik siswa SMA pada penelitian terdahulu (Fernandes, 2022).

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga mendukung kebijakan *Merdeka Belajar* serta memperkuat indikator kinerja perguruan tinggi, khususnya dalam penerapan karya dosen dan penguatan kerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota Padang Panjang.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi politik pemilih pemula serta keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam proses pembelajaran. Sasaran kegiatan adalah guru rumpun Ilmu Sosial yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota Padang Panjang. Tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru terkait strategi dan taktik pengintegrasian materi pelajaran dengan pendidikan politik berbasis model *Connected Political Education* (C-PE). Kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu:

Sosialisasi Program

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pengurus MGMP Sosiologi dan KPU Kota Padang Panjang untuk menyampaikan gambaran umum kegiatan, tujuan, manfaat, serta rencana pelaksanaan. Sosialisasi juga menjadi sarana membangun komitmen dan partisipasi aktif peserta.

Workshop

Pelatihan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, dan lokakarya. Materi pelatihan mencakup: Pengenalan konsep dan prinsip C-PE, Strategi integrasi materi Ilmu Sosial dengan pendidikan politik, Perencanaan dan implementasi pembelajaran berbasis C-PE, Lokakarya difasilitasi oleh narasumber ahli yang membimbing peserta dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan materi ajar berbasis C-PE.

Penerapan Model C-PE di Kelas

Peserta menerapkan model pembelajaran C-PE di kelas masing-masing. Model ini memadukan pengetahuan, nilai, dan keterampilan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, dengan pendekatan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dan penemuan (*discovery learning*). Sintaks pembelajaran, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan pengiring telah dirumuskan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didukung oleh buku panduan dan materi ajar terintegrasi. Pelaksanaan program melibatkan tim pengabdian yang terdiri dari ketua, anggota, dan mahasiswa. Ketua tim bertugas mengoordinasikan seluruh tahapan, anggota tim melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi seminar dan lokakarya, serta melakukan evaluasi.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang merupakan hasil kolaborasi antara Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Sosiologi Universitas Negeri Padang (UNP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang. Kegiatan ini dilaksanakan pada 30 September 2024 di Hotel Rangkayo Basa, dengan melibatkan guru rumpun IPS dan PPKn, kepala sekolah, serta perwakilan institusi pemerintah sebanyak 50 orang.

Tahap Persiapan

Persiapan dimulai pada Maret–Juni 2024, meliputi studi literatur, observasi lapangan untuk memetakan kondisi eksisting pendidikan politik di sekolah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum memiliki perangkat pembelajaran yang memuat unsur pendidikan politik secara terintegrasi. Dalam proses persiapan terjadi kesepakatan formal dilakukan dengan KPU Kota Padang Panjang dan Guru di Kota Padang Panjang. Awalnya, sasaran program adalah siswa SMA, tetapi difokuskan kepada guru sebagai agen utama penyampai materi.

Pelaksanaan

Pelatihan *Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang* dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu seminar, workshop, dan focus group discussion (FGD). Kegiatan ini diikuti oleh guru rumpun IPS dan PPKn dari berbagai SMA/MA di Kota Padang Panjang, dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan materi pendidikan politik secara terintegrasi di dalam pembelajaran intrakurikuler. Materi inti pelatihan mencakup:

Pendidikan Pemilih untuk Generasi Digital Native

Materi pembuka disampaikan oleh Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si. yang membahas fenomena generasi muda Indonesia yang masuk kategori *digital native* kelompok yang tumbuh bersama teknologi digital sejak usia dini (Agbawe, 2019). Dalam konteks politik, generasi ini memiliki akses informasi yang sangat luas, namun juga menghadapi risiko terpapar misinformasi, disinformasi, dan hoaks politik, terutama di media sosial.

Paparan menekankan bahwa literasi politik di era digital tidak bisa dilepaskan dari literasi digital, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memproduksi informasi politik yang valid (Choi, 2016). Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswa dalam menggunakan media sosial sebagai sarana belajar politik yang sehat, misalnya dengan mengajarkan cara memeriksa fakta (*fact-checking*), mengenali bias informasi, dan memahami perbedaan antara opini dan fakta.

Dr. Eka juga memaparkan strategi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi *digital native*, seperti pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang memanfaatkan platform digital, pembuatan konten kreatif terkait pemilu, dan diskusi daring yang terarah. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga produsen konten yang mendidik.

Pengenalan Model Connected Political Education (C-PE) dan Urgensi Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd., yang memperkenalkan Model *Connected Political Education* (C-PE) sebagai kerangka inovatif dalam pembelajaran politik di sekolah. Model

C-PE mengintegrasikan pengetahuan politik dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global. Pendekatan ini menekankan keterhubungan antara teori politik yang dipelajari di kelas dengan pengalaman politik sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna (Myers, 2016).

Dr. Reno menjelaskan bahwa urgensi pendidikan politik bagi pemilih pemula tidak hanya terkait dengan meningkatkan partisipasi dalam pemilu, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Pemilih pemula yang sebagian besar adalah siswa SMA seringkali belum memiliki pengalaman politik yang cukup, sehingga rawan menjadi sasaran kampanye yang tidak sehat. Melalui model C-PE, guru dapat membantu siswa memahami proses politik secara komprehensif, mulai dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, mekanisme pemilu, hingga etika berpolitik.

Dalam sesi ini, peserta juga diajak untuk menganalisis studi kasus seputar Pilkada dan Pemilu di Indonesia, termasuk tantangan seperti politik uang, polarisasi politik, dan penyebaran hoaks. Analisis kasus dilakukan secara kolaboratif dalam format diskusi kelompok, sehingga guru dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis sekaligus belajar dari pengalaman satu sama lain. Dengan demikian, model C-PE diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat diaplikasikan langsung di kelas melalui metode pembelajaran partisipatif dan berbasis masalah (*problem-based learning*).

Perencanaan dan Implementasi Pembelajaran Berbasis Model C-PE

Tahapan teknis pengintegrasian pendidikan pemilih dalam pembelajaran disampaikan oleh Gusmira Wita, S.Pd.Gr., M.Pd. Beliau memandu peserta secara langsung (*hands-on*) dalam menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, hingga instrumen evaluasi yang memuat unsur pendidikan politik. Pendekatan ini memungkinkan peserta memahami langkah demi langkah proses integrasi materi sehingga sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Selain penyusunan perangkat, Gusmira Wita juga memfasilitasi kegiatan *microteaching*, yaitu simulasi pembelajaran di kelas mini yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mempraktikkan integrasi materi pendidikan politik. Dalam sesi ini, peserta memperoleh umpan balik langsung dari fasilitator maupun sesama peserta untuk memperbaiki metode penyampaian, teknik bertanya, dan penggunaan media pembelajaran. Strategi *microteaching* terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan mengajar karena menggabungkan praktik, observasi, dan refleksi secara simultan (Girardet, 2018).

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman guru mengenai urgensi pendidikan politik, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi. Guru diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan kesadaran politik siswa, khususnya pemilih pemula, sehingga partisipasi politik dapat berlangsung secara kritis, cerdas, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Narasumber Sedang Memaparkan materi

Pemahaman Peserta yang Berubah Tentang Politik

Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai konsep politik dan urgensinya dalam pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi, observasi selama kegiatan, dan wawancara pasca-pelatihan, terjadi pergeseran persepsi yang cukup nyata.

Sebelum pelatihan, sebagian peserta memandang politik sebagai ranah praktis yang identik dengan perebutan kekuasaan, konflik kepentingan, dan aktivitas yang bersifat “eksklusif” bagi aktor politik atau partai politik. Persepsi ini umum ditemukan di masyarakat luas, di mana politik sering kali dikaitkan dengan isu-isu negatif seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial (Hajnal, 2024). Akibatnya, pendidikan politik di sekolah cenderung terbatas pada pengenalan struktur pemerintahan secara formal, tanpa membahas relevansinya dengan kehidupan siswa.

Namun, melalui materi yang disampaikan oleh para narasumber, peserta mulai memahami bahwa politik tidak hanya sebatas kontestasi elektoral, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan publik, keterlibatan warga negara, serta pembentukan nilai dan sikap demokratis (Blühdorn & Butzlaff, 2020). Model Connected Political Education (C-PE) yang dikenalkan dalam pelatihan membantu peserta melihat hubungan langsung antara pembelajaran politik di kelas dengan kehidupan sehari-hari siswa, termasuk isu lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi dalam komunitas.

Hasil wawancara mendalam menguatkan perubahan tersebut. Seorang guru Sosiologi dari SMA Negeri 2 Padang Panjang mengungkapkan:

"Sebelumnya saya agak ragu mengangkat topik politik di kelas karena takut dianggap berpihak. Tapi setelah pelatihan ini, saya paham bahwa politik bisa dibahas secara netral, berbasis data, dan justru memberi ruang siswa untuk berpikir kritis." (Wawancara, 30 September 2024)

Guru PPKn dari MAN Kota Padang Panjang menambahkan:

"Materi tentang C-PE membuat saya sadar bahwa politik itu ada di kehidupan sehari-hari siswa, bukan hanya saat pemilu. Misalnya, pengambilan keputusan di OSIS atau musyawarah kelas juga bagian dari proses politik." (Wawancara, 30 September 2024)

Selain itu, seorang guru Sosiologi dari SMA Muhammadiyah Padang Panjang menegaskan pentingnya pendekatan integratif:

"Saya baru memahami bahwa pendidikan politik bisa dilakukan secara terintegrasi dengan materi pembelajaran IPS. Tidak harus menjadi mata pelajaran khusus, tetapi bisa masuk ke topik seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masalah sosial." (Wawancara, 30 September 2024)

Senada dengan itu, guru dari SMA Negeri 1 Padang Panjang menyampaikan:

"Saya kira pendidikan politik hanya tugas guru PPKn. Ternyata, guru mata pelajaran lain pun bisa mengintegrasikan nilai-nilai politik, misalnya di Sosiologi, Geografi, atau Ekonomi, tanpa mengubah kurikulum secara besar-besaran." (Wawancara, 30 September 2024)

Dari 20 dari 50 peserta yang diwawancarai pasca-pelatihan, 85% menyatakan mengalami peningkatan pemahaman tentang definisi politik yang lebih luas, sedangkan 72% mengaku kini memahami bahwa pendidikan politik dapat diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler tanpa menambah beban mata pelajaran. Perubahan pemahaman ini mencerminkan kesadaran baru bahwa membicarakan politik di kelas tidak berarti melakukan indoktrinasi, melainkan membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran sebagai warga negara.

Pembahasan

Pelaksanaan *Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang* menjadi contoh nyata bagaimana program pengabdian masyarakat dapat memberikan dampak langsung terhadap perubahan paradigma guru tentang politik sekaligus keterampilan mereka dalam mengintegrasikannya ke pembelajaran. Program ini menggabungkan pendekatan konseptual, teknis, dan praktis, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna (meaningful learning) bagi para peserta.

Perubahan Paradigma Peserta terhadap Politik

Sebelum pelatihan, sebagian besar guru memiliki pemahaman bahwa politik adalah topik yang bersifat sensitif, cenderung partisan, dan dapat memicu kontroversi di kelas. Kondisi ini serupa dengan temuan McAvoy & Hess (2013) yang mengungkapkan bahwa banyak pendidik menghindari diskusi politik di sekolah karena khawatir dianggap berpihak. Namun, melalui materi *Connected Political Education* (C-PE) yang disampaikan oleh Dr. Reno Fernandes dan sesi pembukaan oleh Dr. Eka Vidya Putra, peserta

diperkenalkan pada konsep politik yang lebih luas bukan hanya politik praktis atau perebutan kekuasaan, tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan publik, pemenuhan hak warga negara, dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Setelah mengikuti pelatihan, terjadi perubahan signifikan dalam persepsi guru. Wawancara dengan salah satu peserta mengungkapkan, "*Saya baru memahami ternyata pendidikan politik bisa dilakukan secara terintegrasi, tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, dan bisa dikaitkan dengan materi IPS yang saya ajarkan*" (Guru IPS SMA X). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa guru mulai menyadari bahwa politik dapat dibahas secara netral, berbasis data, dan kontekstual dengan kehidupan siswa, sehingga mengurangi risiko politisasi pembelajaran.

Selain itu, pemahaman bahwa siswa generasi *digital native* memiliki akses luas ke informasi politik melalui media sosial mendorong guru untuk memposisikan diri sebagai fasilitator yang membimbing siswa memilah informasi yang benar (Araújo et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan Handoko et al., (2023) bahwa pendidikan politik di era digital harus menekankan pada literasi politik dan kemampuan berpikir kritis.

Peningkatan Kapasitas Teknis melalui Pendekatan Praktis

Peningkatan pemahaman guru diperkuat dengan pelatihan teknis yang disampaikan oleh Gusmira Wita, S.Pd.Gr., M.Pd., yang memandu peserta menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, dan instrumen evaluasi yang memuat unsur pendidikan politik. Pendekatan *hands-on* yang digunakan memfasilitasi peserta untuk belajar sambil melakukan (*learning by doing*), menurut teori Kolb, (2015) sangat efektif dalam membentuk keterampilan profesional.

Kegiatan *microteaching* menjadi bagian krusial dalam memastikan keterampilan tersebut dapat diaplikasikan. Dalam sesi ini, guru mempraktikkan pengajaran di kelas mini, mengintegrasikan topik politik sesuai dengan model C-PE, lalu mendapatkan umpan balik dari fasilitator dan rekan sejawat. Asregid et al., (2023) menegaskan bahwa *microteaching* yang menggabungkan praktik, observasi, dan refleksi mampu mempercepat penguasaan keterampilan mengajar secara signifikan.

Salah satu peserta menyatakan, "Tadinya saya bingung bagaimana memasukkan materi politik dalam pembelajaran IPS, tapi setelah *microteaching* dan dibimbing langsung, ternyata bisa dan malah membuat materi lebih hidup" (Guru IPS SMA Y). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi praktis seperti *microteaching* dapat menghilangkan hambatan teknis yang selama ini dihadapi guru.

Sinergi Lintas Lembaga sebagai Kunci Keberhasilan

Kolaborasi antara KPU Kota Padang Panjang dan Tim Pengabdian UNP menciptakan legitimasi dan dukungan kelembagaan yang kuat terhadap pelaksanaan program. Kehadiran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumbar dan Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Padang Panjang juga memberi sinyal bahwa program ini didukung oleh berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam ekosistem pendidikan.

Dukungan ini penting, karena menurut Riano & Irion-Groth, (2022) dan Campbell, (2019), pendidikan kewarganegaraan yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas guru, tetapi juga pada dukungan kebijakan dan kolaborasi dengan lembaga publik. Dengan dukungan ini, guru memiliki keyakinan lebih tinggi untuk menerapkan materi yang telah dipelajari tanpa khawatir menghadapi resistensi dari sekolah atau masyarakat.

Relevansi Kontekstual dengan Pemilu dan Pilkada 2024

Pelatihan ini dilaksanakan dalam konteks menjelang Pilkada 2024, sehingga urgensi dan relevansinya semakin tinggi. Guru-guru dibekali dengan materi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan langsung dapat digunakan dalam membimbing siswa yang akan menjadi pemilih pemula. Seperti disampaikan oleh Masnaidi B., Komisioner KPU Kota Padang Panjang, "Guru memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa. Pemahaman yang benar akan membuat pemilih lebih kritis dan cerdas dalam menghadapi pemilu."

Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda. Jika implementasinya konsisten, program ini berpotensi mengurangi angka *golput* dan meningkatkan kualitas pilihan politik warga, sesuai dengan tujuan pendidikan demokrasi (Levy et al., 2019).

Implikasi terhadap Pengembangan Kurikulum

Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi pendidikan politik dalam pembelajaran intrakurikuler bukan hanya memungkinkan, tetapi juga lebih efektif dibandingkan membuat mata pelajaran khusus. Integrasi memungkinkan guru memanfaatkan konteks materi yang sudah ada, seperti sejarah, geografi, atau sosiologi, untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan keterampilan berpikir kritis. Model C-PE yang diperkenalkan dalam pelatihan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru untuk melakukan integrasi tersebut secara sistematis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang menggabungkan perubahan paradigma, peningkatan keterampilan teknis, dukungan kelembagaan, dan relevansi kontekstual dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat pendidikan politik di sekolah. Keberhasilan di Kota Padang Panjang dapat menjadi model bagi daerah lain, terutama menjelang momentum politik besar seperti pemilu atau pilkada.

Kesimpulan

Pelatihan *Pengintegrasian Pendidikan Politik kepada Guru MGMP Sosiologi di Kota Padang Panjang* telah berhasil mengubah paradigma guru mengenai politik dari sesuatu yang sensitif dan berisiko menjadi materi pembelajaran yang dapat diintegrasikan secara netral dan konstruktif. Melalui kombinasi seminar, workshop, dan *microteaching*, peserta memperoleh pemahaman konseptual tentang pentingnya pendidikan politik bagi generasi *digital native* serta keterampilan teknis untuk mengintegrasikannya dalam perangkat dan proses pembelajaran. Model *Connected Political Education* (C-PE) yang diperkenalkan terbukti memberikan kerangka kerja sistematis bagi guru dalam mengaitkan materi politik dengan kurikulum yang ada. Pendekatan *hands-on* dan simulasi *microteaching* terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri guru untuk menerapkan materi ini di kelas. Kolaborasi antara KPU, UNP, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya menjadi faktor kunci keberhasilan, memastikan legitimasi dan dukungan kelembagaan terhadap implementasi di sekolah. Konteks menjelang Pilkada 2024 menambah urgensi program ini, sekaligus memperkuat relevansi pembelajaran bagi pemilih pemula. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang kritis, melek politik, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Keberhasilan di Kota Padang Panjang dapat direplikasi di daerah lain sebagai strategi penguatan pendidikan politik berbasis sekolah yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agbawe, M. (2019). Challenges and Prospects of Social Media on Digital Natives: The Case of Nigeria. *Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management*, 9(3), 18. <https://doi.org/10.4314/ijikm.v9i3.2>
- Araújo, A. C. De, Knijnik, J., & Ovens, A. P. (2021). How does physical education and health respond to the growing influence in media and digital technologies? An analysis of curriculum in Brazil, Australia and New Zealand. *Journal of Curriculum Studies*, 53(4), 563–577. <https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1734664>
- Asregid, D., Mihiretie, D. M., & Kassa, S. A. (2023). Teacher educators use of feedback to facilitate reflective practice among pre-service teachers during microteaching. *Cogent Education*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2257121>
- Barberá, P., Tucker, J. A., Guess, A., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). *Social media, political polarization, and political disinformation: A review of the scientific literature*.
- Blühdorn, I., & Butzlaff, F. (2020). Democratization beyond the post-democratic turn: towards a research agenda on new conceptions of citizen participation. *Democratization*, 27(3), 369–388. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1707808>
- Campbell, D. E. (2019). What Social Scientists Have Learned About Civic Education: A Review of the Literature. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 32–47. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553601>
- Choi, M. (2016). A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Donbavand, S., & Hoskins, B. (2021). Citizenship Education for Political Engagement: A Systematic Review of Controlled Trials. *Social Sciences*, 10(5), 151. <https://doi.org/10.3390/socsci10050151>
- Duran, D. (2017). Learning-by-teaching. Evidence and implications as a pedagogical mechanism. *Innovations in Education and Teaching International*, 54(5), 476–484. <https://doi.org/10.1080/14703297.2016.1156011>
- Fernandes, R. (2022). Model Pembelajaran Connected To Political Education (C-Pe) Dalam Pembelajaran Sosiologi Untuk Meningkatkan Literasi Politik Pemilih Pemula. Universitas Negeri Padang.
- Erlich, R. R., & Gindi, S. (2019). Are civics teachers different from teachers of other disciplines in their handling of controversial issues? *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(2), 118–130.

-
- <https://doi.org/10.1177/1746197918767082>
- Fernandes, R., Ananda, A., Montessori, M., Putra, E. V., & Tiara, M. (2023). Efektivitas Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Dalam Mata Pelajaran Sosiologi Untuk Membentuk Ketahanan Demokrasi (Studi Pada Siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak, Kota Padang, Sumatra Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jkn.82319>
- Girardet, C. (2018). Why do some teachers change and others don't? A review of studies about factors influencing in-service and pre-service teachers' change in classroom management. *Review of Education*, 6(1), 3–36. <https://doi.org/10.1002/rev3.3104>
- Hajnal, A. (2024). Political polarization and corruption: A theoretical and empirical review. *Intersections*, 10(2), 21–33. <https://doi.org/10.17356/ieejsp.v10i2.1310>
- Handoko, W., Israwan Setyoko, P., & Kurniasih, D. (2023). Youths' Digital Literacy Skills: Critical Thinking to Participate in Elections. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 19–34. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.23229>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson Education, Incorporated. <https://books.google.co.id/books?id=o6DfBQAAQBAJ>
- Kozyreva, A., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2020). Citizens Versus the Internet: Confronting Digital Challenges With Cognitive Tools. *Psychological Science in the Public Interest*, 21(3), 103–156. <https://doi.org/10.1177/1529100620946707>
- Levy, B., Babb-Guerra, A., Batt, L. M., & Owczarek, W. (2019). Can Education Reduce Political Polarization? Fostering Open-Minded Political Engagement during the Legislative Semester. *Teachers College Record: The Voice of Scholarship in Education*, 121(5), 1–40. <https://doi.org/10.1177/016146811912100503>
- Myers, J. P. (2016). Charting a democratic course for global citizenship education: Research directions and current challenges. *Education Policy Analysis Archives*, 24, 55. <https://doi.org/10.14507/epaa.24.2174>
- Rattanaseeve, P., Akarapattananukul, Y., & Chirawut, Y. (2024). Direct democracy in the digital age: opportunities, challenges, and new approaches. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1681. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04245-1>
- Riano, C. R., & Irion-Groth, A. (2022). Civic education networks: working together with universities, NGOs, schools, and policymakers to advance innovative and effective policies and practices. *Socialinis Ugdyimas*, 56(2), 40–52. <https://doi.org/10.15823/su.2021.56.4>
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Heliyon*, 9(1), e12824. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12824>
- Tucker, J., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>
- Tufchi, S., Yadav, A., & Ahmed, T. (2023). A comprehensive survey of multimodal fake news detection techniques: advances, challenges, and opportunities. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 12(2), 28. <https://doi.org/10.1007/s13735-023-00296-3>
-